



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung**



MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun kedepan dapat dicapai.

Sebagaimana pepatah *“Tiada Gading Yang Tak Retak”* kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaanya.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWILJAYO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	 29
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung	29
3.2 Strategi	31
3.3 Arah Kebijakan	35
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 43
 BAB V PENUTUP	 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Data Personil dan Tata Laksana Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 2.2	:	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkominfo
Tabel 2.4	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinkominfo
Tabel 2.5	:	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo
Tabel 2.6	:	Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intra dan internet Pemkab Temanggung
Tabel 2.7	:	Permasalahan dan Isu Strategis
Tabel 3.3	:	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 3.4	:	Pentahapan Renstra Dinkominfo
Tabel 3.5	:	Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo
Tabel 3.6	:	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tabel 4.1	:	Program Perangkat Daerah
Tabel 4.2	:	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 4.3	:	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 4.4	:	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.5	:	Indikator Kinerja Utama Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Tabel 4.6	:	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada tanggal : September 2025

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



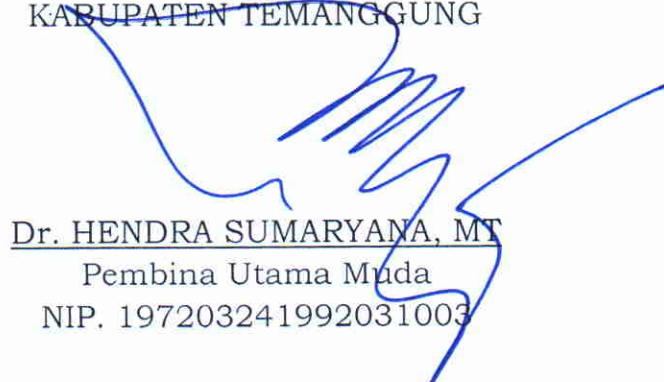
Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator



Aziz Sugiharto, S.AP
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

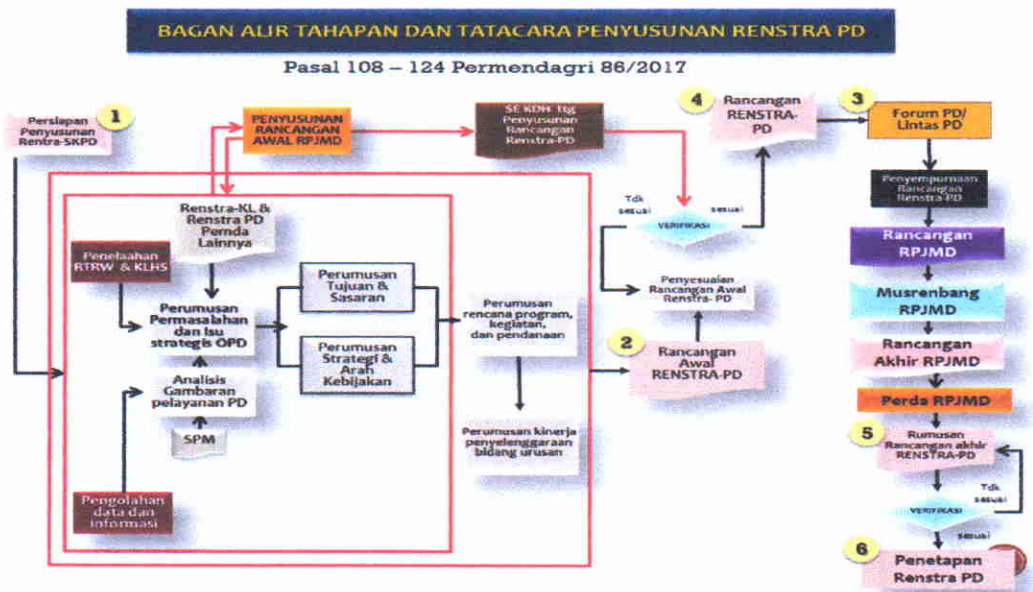
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Keberadaan Dinkominfo menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinkominfo diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi

tata kelola pemerintahan kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029,

RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinkominfo tahun 2025-2029:

1. Maksud disusunnya Renstra Dinkominfo adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinkominfo.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra PD) dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinkominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinkominfo adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan renstra tahun 2025-2029, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menyajikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang tujuan renstra perangkat daerah, sasaran renstra, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra, serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menyajikan tentang uraian program, kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinkominfo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinkominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
5. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
6. layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
7. pemberdayaan dan kemitraan dengan *stakeholder* dan masyarakat dalam diseminasi informasi;
8. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
9. pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah;
10. pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
11. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
12. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
13. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
14. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
15. pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

17. penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
18. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Tugas:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- b. Fungsi:

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan dinas terkait komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, serta membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2. Sekretariat

- a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

- b. Fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
 - 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - 3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan dinas;

- 4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
 - 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - 6) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - 7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:
- 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan program, fasilitasi, dan monitoring di bidang komunikasi, pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan diseminasi informasi, pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik, dan Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik; dengan tugas:

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik: Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik.
- 2) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik: Melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi komunikasi publik.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

b. Fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana prasarana Informasi dan Komunikasi;
- 4) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan dan Sub Koordinator Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika dengan tugas:

- 1) Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang infrastruktur dan jaringan.
- 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengembangan dan layanan aplikasi informatika.

5. Bidang Statistik dan Persandian

a. Tugas:

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian.

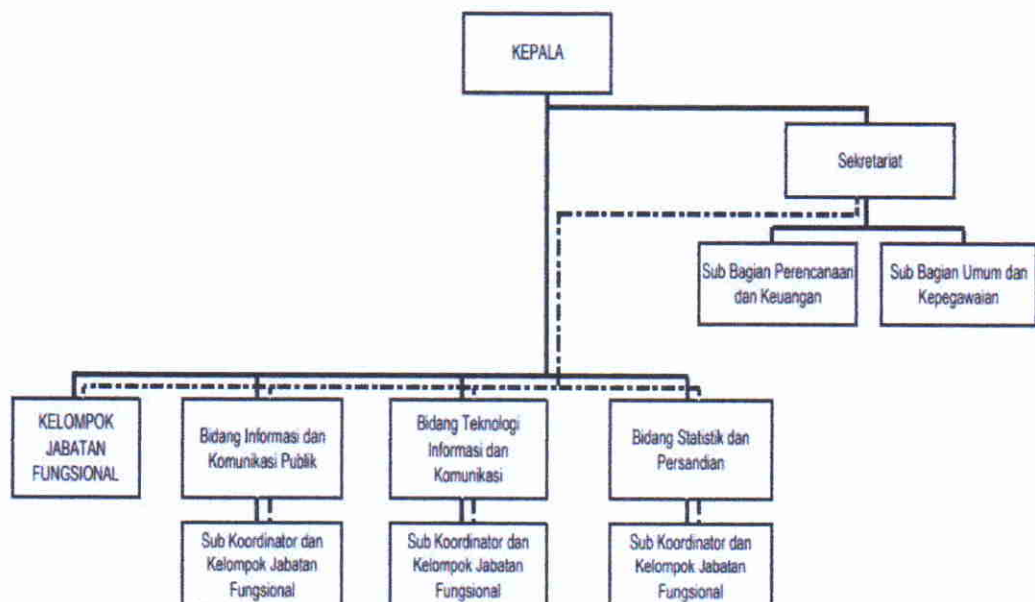
b. Fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Statistik Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi dengan tugas:
- 1) Sub Koordinator Statistik: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang statistik.
 - 2) Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang persandian dan keamanan informasi.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berikut ini gambar Struktur Organisasi Dinkominfo berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinkominfo
Kabupaten Temanggung

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir*)							Golongan/ Pangkat*)				Pendidikan Pelatihan Struktural*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
Kepala Dinas						1					1		1	1	1
Eselon 2b															
Sekretaris					1						1			1	1
Eselon 3a															
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan					1					1					
Eselon 4a															
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian					1					1					1
Eselon 4a															
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik						1				1					1
Eselon 3b															

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)*							Golongan/ Pangkat*				Pendidikan Pelatihan Struktural*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi					1					1					
Eselon 3b															
Kepala Bidang Statistik Dan Persandian					1					1					
Eselon 3b															
Non Eselon	3			7	20	4		1	7	25	2				
Analisis Kebijakan Muda					1					1					
Pranata Komputer Muda					1					1					
Pranata Komputer Mahir				2	2					4					
Pranata Komputer Pertama					7					7					
Pranata Komputer Terampil				1					1						
Pranata Hubungan Masyarakat Muda						1				1					
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil				2					2						
Sandiman Muda					1					1					
Sandiman Pertama					1					1					
Statistisi Pertama					2					2					
Arsiparis Terampil				1					1						
Penelaah Teknis Kebijakan	1								1						
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi					1					1					
Pengelola Layanan Operasional					1					1					
Operator Layanan Operasional	1							1							
Pengadministrasi Perkantoran	1								2						
Pengolah Data dan Informasi				1					1						

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinkominfo diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkominfo

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Ket.
1	Tanah	1 unit	315.400.000	1.577 m2
2	Peralatan dan Mesin	2.343 unit	24.154.562.854	
3	Gedung dan Bangunan	4 unit	7.466.245.442	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20 unit	3.433.707.813	
5	Aset Tetap lainnya	18 unit	167.799.500	
6	Aset Lainnya	12 unit	206.136.457	
Total Nilai Aset			35.537.715.609	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinkominfo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinkominfo

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,80	89,56	88,33	97,38	95,86	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	2,78	3,12	2,80	3,64	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui, bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo dari tahun 2020 sd. Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik mengalami kondisi naik turun. Pada tahun 2020 tercapai 95,80, kemudian mengalami penurunan tahun berikutnya, yaitu turun 0,06 % pada tahun 2021, kemudian turun lagi sebesar 0,01% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, mengalami kenaikan lagi sebesar 0,09% tercapai di angka 97,38, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,015% dan hanya tercapai 95,86.

Fluktuasi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan standar dan parameter penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, evaluasi dan penilaian dilaksanakan dengan melibatkan PPID Badan Publik Pelaksana dan penambahan parameter penilaian, sedangkan pada tahun 2024, evaluasi dan penilaian fokus pada PPID Badan Publik Pemkab Temanggung.

Meskipun terjadi penurunan Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dari 97,38 pada tahun 2023, menjadi 95,38 pada tahun 2024, akan tetapi target kinerja tetap tercapai yaitu mendapatkan predikat **Informatif**.

2. Capaian IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 tercapai diangka 3,64, pada tahun 2021 mengalami penurunan dan hanya tercapai 2,78 atau turun 0,22%, ditahun 2022 terjadi kenaikan diangka 3,12 namun turun lagi di tahun 2023 sebesar 0,10 tercapai diangka 2,80. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 0,84 poin yaitu mencapai 3,64. Indeks ini termasuk dalam kategori baik sekali. Peningkatan nilai secara signifikan di tahun 2024 terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya:
 - a. Sudah adanya regulasi yang mendukung implementasi SPBE berupa peraturan daerah, peraturan bupati, serta surat keputusan bupati;
 - b. Pelaksanaan SPBE didukung penuh oleh pimpinan daerah dan langsung mengkoordinir langsung ke seluruh OPD hingga ke desa sehingga implementasinya bisa lebih maksimal dan efektif;
 - c. Tim pelaksana SPBE yang telah dibentuk bekerja secara maksimal pada tahun 2024 dengan produknya berupa reviu dan perbaikan-perbaikan dokumen arsitektur, manajemen SPBE serta SOP.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	16,17	100	26,15	37,36	70,60	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	74,87	73,62	78,60	100	80,00	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	39,80	39,81	30,00	41,00	

Dari table 2.5 diatas dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah telah terhubung langsung jaringan intra dan internet dengan jaringan Pemkab yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Perangkat Daerah tersebut terdiri atas 26 Badan/Dinas, 20 Kecamatan, dan 23 Kelurahan, total

69 Perangkat Daerah. Media jaringan yang digunakan berupa media radio dan fiber optik.

Tabel 2.6
Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intra dan internet
Pekab Temanggung

No	Perangkat Daerah	Fiber Optik	Radio
1	Badan / Dinas	26	0
2	Kecamatan	6	14
3	Kelurahan	10	13
	Jumlah	42	27

2. Pada proses digitalisasi layanan publik seringkali terkendala pada beberapa hal diantaranya:
 - a. Literasi secara digital di kalangan masyarakat pengguna layanan belum seimbang dengan perkembangan layanan yang ada sehingga layanan publik secara digital belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat;
 - b. Beberapa layanan publik masih berjalan secara terpisah (silo), tanpa integrasi data yang baik antar perangkat daerah;
 - c. Beberapa layanan publik diselenggarakan oleh pemerintah pusat bersifat *top down*, kurang memperhatikan kebutuhan daerah;
 - d. Daerah kesulitan mengakses data pusat karena Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak tersedia, dokumentasi terbatas, atau ada batasan kebijakan.
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan target dan sasaran yang ditetapkan adalah masyarakat yang telah melek informasi dan melek baca, yaitu usia 12 tahun ke atas.

Setiap tahunnya, capaian kinerja mengalami kenaikan, hingga tercapai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan upaya penyebaran informasi secara masif dan berkelanjutan, melalui berbagai kanal komunikasi yang dikelola, baik media elektronik, maupun media non elektronik. Pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian menjadi 80 persen, dikarenakan perluasan sasaran, yaitu masyarakat di atas usia 7 tahun.

4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan dan evaluasi daerah sudah mencapai 100 persen, hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah menggunakan indikator kinerja yang bersumber dari data statistik sektoral.
5. Tingkat Keamanan Informasi di pemerintah daerah didapatkan melalui penilaian Indek KAMI secara mandiri dengan menilai 6 area keamanan informasi yang meliputi:
 - a. Tata Kelola Keamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
 - c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
 - d. Pengelolaan Aset Informasi;
 - e. Teknologi dan Keamanan Informasi; dan
 - f. Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinkominfo memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Instansi vertikal pemerintah;
3. Instansi swasta;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
6. Media massa dan Lembaga Penyiaran;
7. Akademisi;
8. Pemerintah Desa se-Kabupaten Temanggung;
9. Mitra dan stakeholder strategis; dan
10. Masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinkominfo antara lain:

1. Pemahaman OPD tentang SPBE masih belum utuh sehingga masih dianggap hanya sekedar aplikasi. Seharusnya yang perlu dipahami adalah SPBE merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh OPD hanya medianya berupa elektronik atau digital. sehingga idealnya SPBE melekat dan menjadi tanggung jawab bersama;

2. SDM yang benar-benar memahami TIK belum merata di seluruh OPD dan tingkat kemampuannya masih belum seimbang dengan kecepatan perkembangan teknologi yang ada, baik teknologi infrastruktur maupun teknologi perangkat lunak;
3. Masih ada gap dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi utamanya akses internet dan jaringan sinyal di area perkotaan dan pedesaan;
4. Masih adanya wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau pelayanan komunikasi dan informatika;
5. Komunikasi dan informasi publik belum efektif dan terorganisir dengan baik;
6. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik;
7. Akses informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;
8. Masih maraknya narasi negatif, hoak, dan informasi *misleading* yang beredar di masyarakat;
9. Tata kelola data statistik sektoral di Produsen Data belum optimal sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi standar data statistik, metadata, interoperabilitas data serta penggunaan kode referensi;
10. Pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung belum terkelola dengan baik, belum dikelola terstruktur dari perencanaan sampai dengan pengawasan, pelaksanaannya masih banyak secara simultan ketika terjadi insiden keamanan informasi;
11. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
12. Kinerja Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi.

Isu strategis Dinkominfo mencakup berbagai tantangan dan prioritas dalam transformasi digital, pelayanan publik, keamanan informasi, dan pengelolaan data. Beberapa isu utama meliputi pengembangan smart city, penyediaan data yang akurat dan terpercaya, diseminasi informasi yang efektif, penguatan keamanan informasi, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berikut adalah beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo:

Tabel 2.7
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telah memiliki sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan dan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi berupa: Infrastruktur jaringan (FO) ditingkat Perangkat Daerah, data center, data base terintegrasi	1. Pemahaman OPD tentang SPBE masih belum utuh 2. SDM yang benar-benar memahami TIK belum merata di seluruh OPD 3. Masih ada gap dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi utamanya akses internet dan jaringan sinyal di	Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan	Perkembangan transformasi digital.	Pemanfaatan infrastruktur digital, literasi digital, dan keamanan siber	Transformasi digital	Penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK Penguatan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	area perkotaan dan pedesaan 4. Masih adanya wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau pelayanan komunikasi dan informatika; 5. Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung belum terkelola dengan baik					
Pelayanan publik Sebagian sudah menerapkan sistem elektronik dengan database yang terintegrasi	1. Masih banyak aplikasi dari pemerintah pusat yang mengelola data secara tertutup sehingga menyulitkan integrasi data, serta layanan data dan informasi dilingkup Kabupaten Temanggung					Pengoptimalan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi
1. Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, termasuk layanan data dan informasi sudah dilaksanakan berupa pemenuhan daftar informasi melalui media komunikasi publik yang dikelola oleh Pemkab.	1. Komunikasi dan Informasi Publik belum efektif dan terorganisir dengan baik; 2. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik; 3. Akses Informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;	Berperan dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya terkait isu-isu lingkungan kepada masyarakat	Penyebaran informasi tentang pemanfaatan teknologi digital.	Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Publik terhadap Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Penyiapan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa media dan juga bekerjasama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), dan Relawan TIK	4. Masih maraknya narasi negatif, hoax, dan informasi <i>misleading</i> yang beredar di masyarakat 5. Tata kelola data belum optimal sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia; 6. Pembangunan metadata statistik sektoral belum optimal.					

Isu strategis Dinkominfo mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu terkait digitalisasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Fokus pada isu-isu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan memperkuat komunikasi serta keterbukaan informasi publik.

BAB III

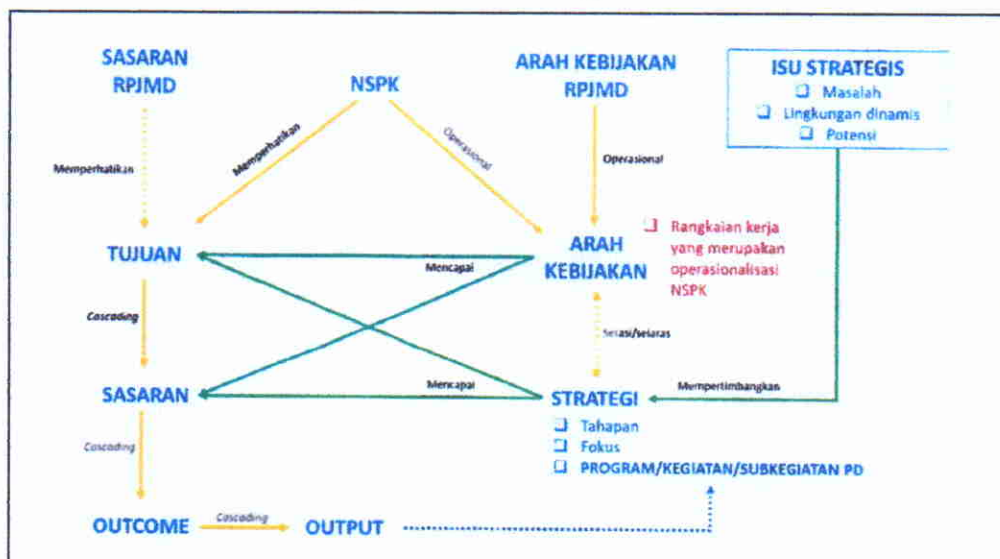
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

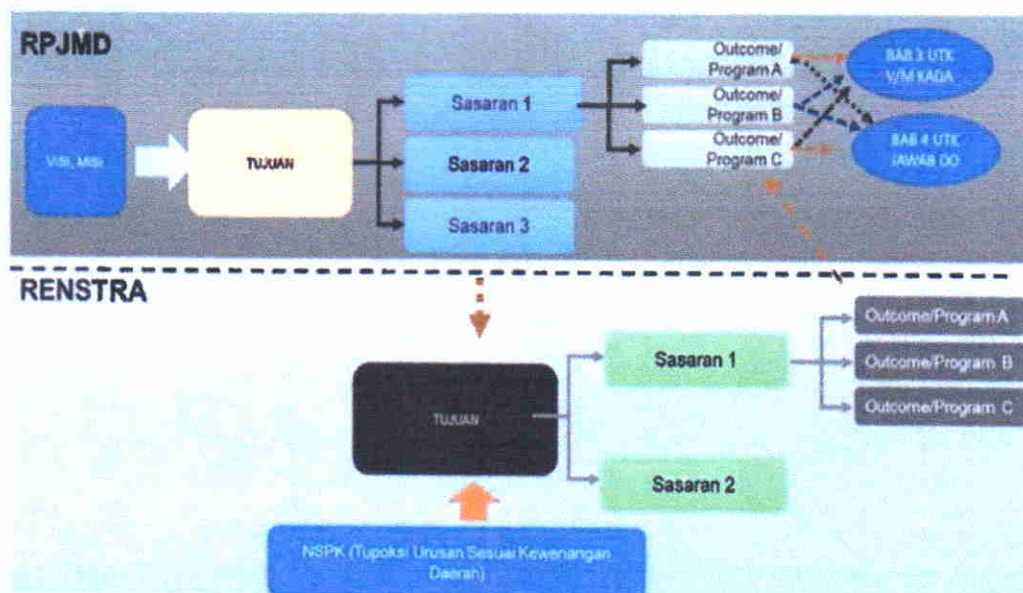
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinkominfo diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Terwujud nya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkat nya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.64	3.70	3.75	3.80	3.85	3.90	4.00	
		Meningkat nya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.64	3.70	3.75	3.80	3.90	3.95	4.00	
		Meningkat nya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai keterbukaan informasi publik	95,86	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0	79,9	82,3	83,3	84,3	85,3	86,3	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,50	74,20	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinkominfo dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinkominfo diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Digital

Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Digital dilakukan melalui Pengembangan sistem informasi terintegrasi dan digitalisasi data melalui pembangunan *super app*. Langkah ini dilakukan menuju percepatan transformasi digital untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan infrastruktur TIK menjadi krusial dilakukan guna pelayanan publik yang modern. Infrastruktur TIK yang kuat memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, akses informasi yang cepat, inovasi, serta keamanan data dan sistem yang mumpuni. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu; Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK termasuk didalamnya data center dan jaringan komunikasi antar-instansi, pemanfaatan cloud server, pemerataan jaringan internet hingga ke tingkat rumah tangga melalui kerjasama dengan penyedia layanan.

3. Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi

Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi melibatkan tiga pilar utama: manusia, proses, dan teknologi, yang diterapkan melalui strategi seperti penggunaan otentikasi multifaktor (*MFA*), enkripsi data, pembaruan perangkat lunak secara berkala, dan pelatihan kesadaran keamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem dari ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan lainnya. Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan antara lain; Peningkatan Indeks Keamanan Informasi melalui Peningkatan sarana prasarana Keamanan informasi, dan penerapan teknologi keamanan informasi (*firewalls, anti-virus, dan enkripsi data*)

4. Peningkatan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan informasi publik memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan teknologi, keterampilan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini diperlukan langkah strategis yang meliputi; Penguatan sistem layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat melalui pengembangan kanal digital yang responsif dan mudah diakses, pemanfaatan teknologi digital seperti portal daring dan media social, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Masyarakat, dan penguatan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

5. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral fokus pada perbaikan kualitas data statistik yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah, melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM statistik, serta perbaikan proses kerja dan sistem koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar instansi. Tujuannya adalah penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan tata kelola dan layanan publik dilakukan melalui penerapan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital secara optimal seperti tanda tangan elektronik (TTE), penyediaan data melalui Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) yaitu sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan semua jenis data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi.

7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP membantu untuk memastikan transparansi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran yang sesuai dengan rencana strategis. Langkah penting yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk

mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur. Melalui penentuan fokus kegiatan prioritas setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan.

Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinkominfo Kabupaten Temanggung diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik;
3. Akselerasi Pembangunan Prioritas;
4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan
2. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesiambungan Pembangunan.

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinkominfo

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan dasar dan kapasitas Pembangunan (analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan system)	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik (mencakup pengembanan infrastruktur digital, implementasi sistem e-government dan teknologi mobile, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Fokus utamanya adalah pada transparansi, akuntabilitas, standarisasi, dan inovasi layanan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan Masyarakat)	Akselerasi Pembangunan Prioritas (berfokus pada tiga area utama: pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, pengembangan teknologi digital, dan peningkatan talenta digital. Prioritas ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital, memastikan akses layanan digital berkualitas hingga ke desa, dan membangun ekosistem digital yang aman dan terintegrasi)	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan (memastikan kelarasan seluruh program dan kegiatan Kominfo dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, memastikan keberlanjutan dampak dan pemanfaatan sumber daya.	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesenambungan Pembangunan (memastikan keberlanjutan program-program di bidang komunikasi dan informatika, yang meliputi pengembangan infrastruktur digital, manajemen data, dan komunikasi publik, agar tetap berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang. Ini dilakukan melalui perencanaan strategis, sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, kolaborasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong transformasi digital di kabupaten Temanggung)

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinkominfo tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo	Keterangan
1	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	• Pengembangan sistem informasi terintegrasi • Digitalisasi data (<i>super app</i>)	• Pengembangan aplikasi • Integrasi data OPD
2	Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	• Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK • Pemanfaatan cloud server • Pemerataan jaringan internet	• Membangun jaringan internet yang kuat dan aksesibel di berbagai wilayah • Mengembangkan platform digital untuk penyediaan informasi publik, seperti portal informasi pemerintah, aplikasi mobile, dan media sosial. • Menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi untuk mengelola informasi pemerintahan • Membangun sistem data terpadu yang terintegrasi • Meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi kebijakan publik
		Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	• Peningkatan Indeks Keamanan Informasi • Penerapan teknologi keamanan informasi	• Kerjasama dengan BSSN dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pengelola informasi • Peningkatan kapasitas (<i>firewalls, anti-virus, dan enkripsi data</i>) • Penerapan TTE di seluruh PD dan Desa di Kabupaten Temanggung
3	Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan tata kelola dan layanan informasi publik	• Penguatan sistem layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat • Pemanfaatan teknologi digital • Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat • Penguatan Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Pengembangan platform pengaduan digital • Peningkatan kapasitas SDM • Monitoring & evaluasi layanan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo	Keterangan
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM statistik, • Perbaikan proses kerja dan sistem koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar instansi	• Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur • Penerapan ekosistem data yang mendukung Satu Data Indonesia.
4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	Penerapan dan pengembangan inovasi pelayanan publik	• Fasilitasi inovasi digital • Kolaborasi pihak ketiga
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja	• Perencanaan kinerja yang baik • Penetapan kinerja yang terukur • Pengukuran Kinerja • Pelaporan kinerja • Pencapaian Kinerja

Dengan arah kebijakan yang jelas dan terarah, Dinkominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah, baik melalui peningkatan layanan publik, pemerataan informasi, maupun transformasi digital. Adapun keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Digital	• Pengembangan sistem informasi terintegrasi • Digitalisasi data (<i>super app</i>)
	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK • Pemanfaatan cloud server • Pemerataan jaringan internet

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	• Peningkatan Indeks Keamanan Informasi • Penerapan teknologi keamanan informasi (<i>firewalls, anti-virus, dan enkripsi data</i>)
		Peningkatan layanan informasi publik	• Penguatan sistem layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat • Pemanfaatan teknologi digital • Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat • Penguatan Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektor	• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM statistik, • Perbaikan proses kerja dan sistem koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar instansi
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan dan pengembangan inovasi pelayanan publik
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Penguatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE. Di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kelebihan pada layanan administrasi

pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selain itu pada aspek layanan publik berbasis online, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki layanan pengaduan layanan publik, serta layanan informasi dan dokumentasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan badan publik, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan, serta mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan SPBE Kabupaten Temanggung tidak hanya berpusat di tingkat pemerintah kabupaten saja, tetapi juga dikembangkan ditingkatan paling bawah yaitu Pemerintah Desa. Pada tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinkominfo telah menerapkan desa digital dengan membangun *smart village* atau desa cerdas diseluruh desa di Kabupaten Temanggung, yaitu sebuah konsep pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing masyarakat desa. Konsep ini mengadopsi prinsip kota cerdas (*smart city*) dan berfokus pada transformasi digital untuk mengatasi berbagai masalah lokal, mulai dari infrastruktur, layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi, namun tetap selaras dengan kearifan lokal dan budaya desa. Melalui penerapan teknologi digital, warga dapat mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, desa juga memiliki sarana untuk mempromosikan berbagai kegiatan dan event yang diselenggarakan, sehingga mampu menarik minat wisatawan, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan pendapatan desa.

Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Temanggung, saat ini mulai dikembangkan *super app* yaitu sebuah sistem informasi terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan publik dalam satu platform digital, yang dirancang untuk menyederhanakan akses bagi masyarakat. Sistem ini mengumpulkan berbagai layanan yang sebelumnya terpisah dari berbagai dinas atau perangkat daerah ke dalam satu portal, memungkinkan pengguna mengaksesnya melalui *smartphone* (android). Dengan dibangunnya platform digital *super app* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dan informasi daerah. Hal ini tentu akan mengurangi kebingungan karena tidak perlu mengunduh banyak aplikasi, menghemat ruang penyimpanan *smartphone*, serta mempercepat pelayanan publik secara keseluruhan.

Guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Dinkominfo menyusun rencana tindak pengendalian untuk manajemen setiap risiko yang mungkin terjadi dan dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan. Proses manajemen risiko ini bersifat sistematis dan terintegrasi. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang positif, dengan cara mengembangkan strategi dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau mengatasi konsekuensinya.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Tahap awal yang melibatkan pencarian dan pengenalan risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi organisasi meliputi risiko finansial, operasional, reputasi. Ini adalah fondasi dari keseluruhan proses manajemen risiko.

2. Analisis Risiko

Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan analisis untuk memahami sifat risiko tersebut. Fokusnya adalah pada penyebab risiko dan potensi dampaknya terhadap organisasi.

3. Evaluasi/Penilaian Risiko

Pada tahap ini, risiko-risiko yang telah dianalisis diprioritaskan. Penilaian ini membantu dalam menentukan tingkat skala risiko (besaran atau level risiko) berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan.

4. Penanganan/Mitigasi Risiko

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah penanganan risiko dirumuskan. Ini bisa berupa penghindaran risiko, pengurangan, pemindahan, atau penerimaan risiko.

5. Pemantauan Risiko

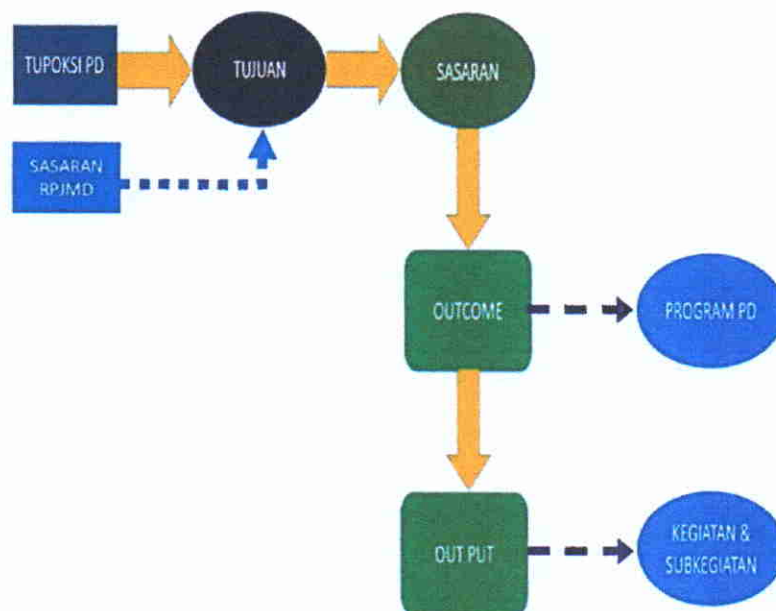
Tahap terakhir adalah memantau secara berkelanjutan terhadap risiko dan efektivitas langkah-langkah penanganan yang telah diterapkan. Hal ini memastikan bahwa strategi manajemen risiko tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan situasi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Program, Indikator program, target kinerja serta pagu indikatif tahun 2026-2030 Dinkominfo disajikan sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu			Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.674.682.270		8.729.556.316		8.864.922.699		9.105.863.121		9.083.391.080					
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.388.963.270		6.442.237.313		6.545.809.961		6.743.151.064		6.719.025.125					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian (%)	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.388.963.270	100	6.442.237.313	100	6.545.809.961	100	6.743.151.064	100	6.719.025.125					
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026					
Meningkatnya jaringan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif (%)	85,29	85,5	85,75	505.000.000	86	505.353.500	86,25	512.377.914	86,5	522.010.618	86,75	522.376.026					
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik (%)	100	100	100		100		100		100		100						
	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100						
	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik (%)	0	15	17,5		20		22,5		25		25						
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	80	80,5	80,75		81		81,25		81,5		81,75						

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.780.719.000		1.781.965.503		1.806.734.824		1.840.701.439		1.841.989.929	
Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.780.719.000	100	1.781.965.503	100	1.806.734.824	100	1.840.701.439	100	1.841.989.929	
	Persentase layanan publik secara elektronik (%)	50,38	55	75		85		95		100		100		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	70,6	75	85		90		95		100		100		
	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik (%)	100	100	37,68		66,67		100		100		100		
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	90,52	91	91,5		92		92,5		93		93,5		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.021.000	100	30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) (Angka)	39,32	40	50		55		60		65		70		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	100	100	100		100		100		100		100				
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257			
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	41	46	48	334.999.600	50	335.234.100	52	339.893.854	54	346.283.858	56	346.526.257			
	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks)	87,67	300	300		320		340		360		380				
TOTAL KESELURUHAN					9.039.681.870		9.094.811.416		9.235.254.845		9.483.157.511		9.460.949.576			

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	(02) Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi	(03) Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(04) Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	(05) Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	(06) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(07) (08)	
					Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Perengkapan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Persentase layanan publik secara elektronik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas layanan publik		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Persentase layanan publik secara elektronik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas layanan publik				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Nilai keterbukaan informasi publik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Informasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun memanfaatkan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi public	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
					Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Ketersediaan data statistik sektoral	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.674.682.270		8.729.556.3160		8.864.922.699		9.105.863.121		9.083.391.080			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.388.963.270		6.442.237.313		6.545.809.961		6.743.151.064		6.719.025.125			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	6.388.963.270	100	6.442.237.313	100	6.545.809.961	100	6.743.151.064	100	6.719.025.125			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000			
Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11	11		11		11		11		11				
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				900.000		900.000		900.000		900.000		900.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	900.000	7	900.000	7	900.000	7	900.000	7	900.000			
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11	11	600.000,00	11	600.000,00	11	600.000,00	11	600.000,00	11	600.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.543.892.133		3.638.127.713		3.678.821.461		3.714.619.064		3.747.812.625			
Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	40	3.543.892.133	40	3.638.127.713	40	3.678.821.461	40	3.714.619.064	40	3.747.812.625			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.543.892.133		3.638.127.713		3.678.821.461		3.714.619.064		3.747.812.625			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	40	3.543.892.133	40	3.638.127.713	40	3.678.821.461	40	3.714.619.064	40	3.747.812.625			
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000			
Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000			
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000			
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000	7.000	745.009.000			
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.757.100		232.514.000		244.139.000		350.173.000		291.294.000			
Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6	230.757.100	4	232.514.000	5	244.139.000	4	350.173.000	3	291.294.000			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		3		3		6		5				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029				2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	12		12		12		12		12						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4		6		6		6		6						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3		3		4		4		3						
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4.988.500		5.038.000		5.290.000		5.713.000		6.136.000					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	4.988.500	6	5.038.000	6	5.290.000	6	5.713.000	6	6.136.000					
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.907.600		60.968.000		64.016.000		148.500.000		94.500.000					
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	60.907.600	3	60.968.000	3	64.016.000	6	148.500.000	5	94.500.000					
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.515.000		51.020.000		53.571.000		65.000.000		50.000.000					
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	50.515.000	3	51.020.000	4	53.571.000	4	65.000.000	3	50.000.000					
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.000.000		22.220.000		23.331.000		25.197.000		27.063.000					
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6	22.000.000	4	22.220.000	5	23.331.000	4	25.197.000	3	27.063.000					
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.500.000		9.595.000		10.074.000		10.879.000		11.684.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	9.500.000	12	9.595.000	12	10.074.000	12	10.879.000	12	11.684.000	
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				27.982.000		28.261.000		29.674.000		32.047.000		34.420.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	27.982.000	12	28.261.000	12	29.674.000	12	32.047.000	12	34.420.000	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.864.000		55.412.000		58.183.000		62.837.000		67.491.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	12	54.864.000	12	55.412.000	12	58.183.000	12	62.837.000	12	67.491.000	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.704.634.037		1.721.678.600		1.767.762.500		1.814.586.000		1.831.409.500	
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.704.634.037	12	1.721.678.600	12	1.767.762.500	12	1.814.586.000	12	1.831.409.500	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				560.000		565.600		593.000		640.000		687.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	12	560.000	12	565.600	12	593.000	12	640.000	12	687.000	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				7.000.000		7.070.000		7.423.500		8.017.000		8.610.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.000.000	12	7.070.000	12	7.423.500	12	8.017.000	12	8.610.500	
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.008.800		14.148.000		14.856.000		16.044.000		17.232.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.008.800	12	14.148.000	12	14.856.000	12	16.044.000	12	17.232.000	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.683.065.237		1.699.895.000		1.744.890.000		1.789.885.000		1.804.880.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.683.065.237	12	1.699.895.000	12	1.744.890.000	12	1.789.885.000	12	1.804.880.000	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.171.000		103.408.000		108.578.000		117.264.000		102.000.000	
Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	163.171.000	26	103.408.000	26	108.578.000	26	117.264.000	26	102.000.000	
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.171.000		103.408.000		108.578.000		117.264.000		102.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	163.171.000	26	103.408.000	26	108.578.000	26	117.264.000	26	102.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)												(14)
Dinas Operasional atau Lapangan														
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif (%)	85,29	85,75	505.000.000	86,00	505.353.500	86,25	512.377.914	86,50	522.010.618	86,75	522.376.026		
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik (%)	0,00	17,50		20,00		22,50		25,00		25,00			
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026		
Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Persentase khlayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	20,00	505.000.000	22,50	505.353.500	25,00	512.377.914	27,50	522.010.618	30,00	522.376.026		
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan (Orang)	-	-		-		-		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)											(14)
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.560.719.000		1.561.965.503		1.586.734.824		1.620.701.439		1.621.989.929	
Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	3	3	1.560.719.000	3	1.561.965.503	3	1.586.734.824	3	1.620.701.439	3	1.621.989.929	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
			(04)	(05)		(06)	(07)		(08)	(09)		(10)	(11)			(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)															(14)	
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	1		4							4				4		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/kota (Perangkat Daerah)	46	46		46							46				46		
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	-	-		-							-				-		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1.430.591.000		1.431.837.503					1.456.606.824				1.490.573.439		1.491.861.929	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	46	46	1.430.591.000	46	1.431.837.503	46	1.456.606.824	46	1.490.573.439	46	1.491.861.929						
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				0		0					0				0			
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			-	-	0	
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				49.528.000		49.528.000					49.528.000				49.528.000		49.528.000	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	1	49.528.000	4	49.528.000	4	49.528.000	3	49.528.000	4	49.528.000			4	49.528.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan				80.600.000		80.600.000					80.600.000				80.600.000		80.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029			
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Kabupaten atau Kota Cerdas															
Tertekannya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	3	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239			
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239			
	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) (Angka)	39,32	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00				
	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	100	100		100		100		100		100				
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239			
Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	30.000.000	100	30.021.000		30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239			
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	-		-		-		-		-				
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239			
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	30.000.000	100	30.021.000		30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks)	87,67	300		320		340		360		380		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	46	46	334.999.600	46	335.234.100	46	339.893.854	46	346.283.858	46	346.526.257	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				34.999.600		35.234.100		39.893.854		46.283.858		46.526.257	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	46	46	34.999.600	46	35.234.100	46	39.893.854	46	46.283.858	46	46.526.257	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas layanan publik	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Pada tabel 4.4. diatas diketahui bahwa Program Prioritas Bupati Temanggung untuk periode tahun 2025-2029 yang menjadi urusan Dinkominfo terdapat 4 (empat) program prioritas yang secara langsung mendukung visi misi RPJMD.

Selanjutnya pada tabel 4.5 berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja setiap tahun mulai tahun 2025 sd. tahun 2030.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks SPBE	Indeks	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	4,00	
2	Indeks layanan SPBE	Nilai	4,50	4,60	4,70	4,75	4,80	4,90	
3	Indeks tata kelola SPBE	Nilai	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	79,9	82,3	83,3	84,3	85,3	86,3	
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,75	75,25	75,5	75,75	76	76,25	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Indeks SPBE, Indeks Layanan SPBE, Indeks Tata Kelola SPBE, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Target kinerja IKU tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan bertahap setiap tahun hingga tahun 2030, Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Kominfo dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital secara progresif dan berkelanjutan. Seluruh indikator tersebut menjadi tolak

ukur penting dalam mengukur efektivitas penerapan SPBE secara menyeluruh, sekaligus menggambarkan peran strategis Dinas Kominfo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinkominfo juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis organisasi yang secara fokus pada pencapaian tujuan strategis yang spesifik. Periode tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

N O	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	positif	%	80,00	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	70,60	75	85	90	95	100	100	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

N O	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	pembangunan daerah										
7.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
9.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	41	46	48	50	52	54	56	

BAB V

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinkominfo untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinkominfo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinkominfo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo dan atau target kinerja sasaran Dinkominfo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinkominfo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinkominfo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinkominfo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinkominfo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha,

akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo ini.

Temanggung, 15 September 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TABEL RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RESIKO
- POHON KINERJA
- TABEL CASCADING KINERJA
- CROSSCUTTING KINERJA
- SK TIM PENYUSUN RENSTRA DINKOMINFO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029
- RENVANA AKSI TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029
- CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA
- SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINKOMINFO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda : Kabupaten Temanggung
 Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : 2026-2029
 Tujuan Strategis : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi
 Urusan Pemerintahan : Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

Tujuan Dan Sasaran Strategis Pemda	Tujuan Dan Sasaran Pd	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berkeadilan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi											
Sasaran: Terwujudnya Peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Serangkaian aktivitas yang terstruktur untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi serta infrastruktur SPBE, memastikan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Proses ini melibatkan penataan tata laksana, pengorganisasian sumber daya IT, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima.	Risiko Operasional	Keamanan Informasi, Aplikasi dan Persandian Pemkab Temanggung belum optimal	RSO 25.2 1.19.04	17	Keamanan informasi belum diurus utamakan menjadi prioritas pembangunan daerah	Rentan terhadap serangan cyber dan resiko terganggunya jaringan serta sistem informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung	Melakukan upgrade WAF	Kepala Dinkominfo	2026-2029

Tujuan Dan Sasaran Strategis Pemda	Tujuan Dan Sasaran Pd	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Sasaran 3 :Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Badan publik menyebarkan informasi yang dimiliki kepada masyarakat agar dapat diakses dan digunakan untuk pengawasan, partisipasi dalam kebijakan, serta akuntabilitas pemerintahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Proses ini mencakup pengelolaan informasi, penyediaan informasi publik yang sifatnya wajib, berkala, dan serta merta, pelayanan permohonan informasi, hingga evaluasi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik	Risiko Kepatuhan	Penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau kelompok	RSO 25.1 6.19.05	16	Kurang patuhnya pihak internal dan eksternal terhadap regulasi keterbukaan informasi dan berbagi pakai data	Data dan informasi dapat digunakan untuk meraih tujuan dan keuntungan pribadi atau kelompok	Monitoring dan Evaluasi secara berkala kepatuhan dan layanan KIP	Kepala Dinkominfo	2026-2029

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi									
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
Tujuan	Indikator	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik				Indikator Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	
Sasaran Program	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Sasaran Kegiatan	Indikator	Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akseptabilitas layanan pemerintah		Persentase pengembangan aplikasi yang terintegrasi		Terseleenggaranya kegiatan administrasi keuangan		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
		Meningkatnya layanan pemerintahan digital yang memperhatikan prinsip SMKI		Persentase tingkat kelengkapan pengantaran informasi		Terseleenggaranya kegiatan administrasi keuangan		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)		Terseleenggaranya administrasi keuangan	
Output 1	Indikator	Terseleenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik		Persentase layanan publik secara elektronik		Terseleenggaranya kegiatan statistik sektoral		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	
		Terseleenggaranya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					

Output 2	Meningkatnya OPD yang mengimplementasikan sistem smart city sesuai masterplan smart city	Terpenuhinya kapasitas bandwidth jaringan kota perantara daerah	Terpenuhinya layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah	Terpenuhinya data prioritas pemintaan daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator	Jumlah OPD/instansi yang mengimplementasikan smart city sesuai masterplan smart city	Jumlah kapasitas bandwidth (Mbps)	Jumlah Perangkat Daerah telah menggunakan layanan keamanan informasi	Jumlah data prioritas yang tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Output 3		Terlaksananya sarana prasarana data center				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor
Indikator		Jumlah server yang berfungsi optimal				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan
Output 4						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Output 5						Tersedianya Barang Cetak dan Pencetakan	
Indikator						Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	
Output 6						Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	
Indikator						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
Output 7						Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Indikator						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



TABEL CASCADING KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									Nilai	3,75	3,8	3,85	3,9	4
		1. Meningkatkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							Nilai	3,75	3,80	3,90	3,95	4,00
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase layanan publik secara elektronik					Persen	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9
						Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah domain/sub domain yang berfungsi optimal	Domain	455	467	475	490	510

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	2. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										Nilai	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang built 2. Persentase rumah tangga dengan akses Internet					Persen	3,2	3,4	3,6	3,7	4
										Persen	9,5	92	92,5	93	93,5
						Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah server yang berfungsi optimal	Server	25	25	25	25	25
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD yang tersambung Jaringan Intra pemerintah daerah melalui fiber optik	PD	46	46	46	46	46
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah layanan publik elektronik yang terintegrasi	Layanan	55	59	64	70	75
								Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	Rumah Tangga	160.000	186.000	212.000	225.000	240.000

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)					Nilai	300	320	340	360	380
						Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keg	20	20	20	20	20
								Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	PD	46	46	46	46	46
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik									Nilai	96,5	97	97,5	98	98,5
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi Informasi Dinkominfo yang aktif					Persen	85,75	86	86,25	86,5	86,75

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2. Persentase terselenggaranya diseminasi Informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik					Persen	100	100	100	100	100
					3. Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola					Persen	100	100	100	100	100
					4. Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan Informasi komunikasi publik					Persen	17,5	20	22,5	25	27,5
						Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar Informasi publik	Persen	20	22,5	25	27,5	30
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar Informasi publik	Persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
								Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah pelaku komunikasi publik yang meningkat	Orang	500	600	700	800	900

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun					
											2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) 2. Ketersediaan data statistik sektoral					Nilai	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
										Persen	100	100	100	100	100	
						Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Tamansong	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
								Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persen	79,00	82,00	85,00	89,00	92,00	
								Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah produsen data yang aktif dalam menyediakan data	Produsen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			IKM Perangkat Daerah							Nilai	82,30	83,30	84,30	85,30	86,30	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah							Nilai	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu					Persen	100	100	100	100	100	
					2. Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang					Persen	100	100	100	100	100	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun					
											2026	2027	2028	2029	2030	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
						Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	40	40	40	40	40
						Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7000	7000	7000	7000	7000	7000
						Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	3	4	5	5
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4	5	4	4	3

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12	12	12
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12
				Tersedianya jasa pelayanan perkantoran			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	27	27	27



CROSSCUTTING KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

Tujuan:
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi

Indikator:
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Sasaran Strategis 3: Meningkatnya keterbukaan informasi publik				Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			
Indikator Sasaran: Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indikator Sasaran: Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indikator Sasaran: Nilai Keterbukaan Informasi Publik				Indikator Sasaran: Nilai AKIP Perangkat Daerah > IKM Perangkat Daerah			
Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting
Pengelolaan Aplikasi Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD
Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD
Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Perentase tata kelola SPBE yang baik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD	Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya layanan berbasis elektronik	Perentase layanan publik berbasis elektronik	- APJI - APTI - PANDI - Penyele SSL - Semua PD





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 4961995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 050/12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

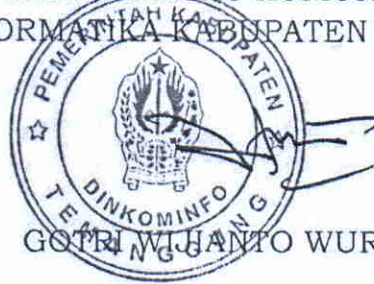
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;
 3. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;
 4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinkominfo;
 5. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinkominfo dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Temanggung
 6. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo;
 7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan Dinkominfo;
 8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinkominfo disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 April 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIGANTO WURIATMOJO

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung ;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 4. Yang bersangkutan; dan
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/12 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 APRIL 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	ADI PITOKO, S.Sos., M.M.	Ketua	Sekretaris Dinas
2	SUPRIYATI, S.Sos	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	YUNIETI, S.Sos	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	LISA PUSPITASARI, S.Sos.	Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
5	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Anggota	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
6	HASAN DARAJAT PANGUDI, ST	Anggota	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
7	ALEX KUSBIYANTO, SE	Anggota	Analisis Kebijakan Muda
8	HANDOYO, S.T.	Anggota	Sandiman Muda
9	EKO KUS PRASETYO, ST, M.Eng	Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Muda
10	ARI KURNIAWAN, S.Kom	Anggota	Pranata Komputer Muda
11	MUSIRON ABDUL DASIR	Anggota	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
12	TRI PURNOMO, S.KOM	Anggota	Pranata Komputer Mahir
13	RIZKI FITRIANY, S,Kom	Anggota	Pranata Komputer Mahir
14	AKHMAD SAFIYUDIN, S.Kom.	Anggota	Analisis Data dan Informasi
15	TAAT SETIABUDI, S.Kom.	Anggota	Pranata Komputer Pertama

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WUNJANTO WURIATMOJO

RENCANA AKSI TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
1	Persiapan penyusunan	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2025-2029	Rapat internal	April 2025	SK Tim Penyusun Renstra	
		Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra	Rapat internal	April 2025	Rencana Aksi Tim Penyusun Renstra	
		Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Data Pokok triwulan 4 tahun 2024)	Data pokok perencanaan pembangunan Triwulan-4 tahun 2024, Lap. Capain IKPD 2024, dan Laporan evaluasi Renstra 2024-2026	Mei 2025	Dokumen Perencanaan	
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2025-2029	Penyusunan rancangan awal Renstra sesuai pagu indikatif yang diterbitkan Bapeda	Penyusunan matrik pagu indikatif ranwal Renstra 2025-2029	Mei 2026	Matrik Ranwal Renstra 2025-2029	
		Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	Juni 2025	Dokumen Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
3	Pelaksanaan Forum Internal Perangkat daerah	- Analisis gambaran pelayanan - Analisis permasalahan - Penelaahan dokumen perencanaan lainnya - Analisis isu strategis - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan	Rapat koordinasi	Juli 2025	Dokumen Hasil analisis	
4	Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029	Menyusun/menyempurnakan rancangan awal Renstra berdasarkan edaran pagu indikatif	Matrik Rancangan Renstra 2025-2029	Juli 2026	Matrik Rancangan Renstra 2025-2029	
		Verifikasi Rancangan Renstra oleh Kepala PD		Agustus 2025		
		Desk Rancangan Awal Renstra oleh tim verifikasi Bapeda		Agustus 2025	BA Hasil Desk Bapeda	
5	Input SIPD	Input pagu indikatif awal		Agustus 2025	Hasil input aplikasi SIPD	
6	Perumusan Rancangan Akhir	Penyempurnaan Rancangan Renstra berdasarkan pagu		Agustus 2025	Dokumen Rancangan Renstra	
		Penyusunan Pra RKA per sub kegiatan	Penyusunan pra RKA oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan	Agustus 2025	Dokumen RKA	

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
		Desk Rancangan Renstra oleh tim verifikasi Bapeda		Agustus 2025	BA Hasil Desk Bapeda	
		Menyempurnakan Rancangan Renstra sesuai BA hasil Desk		Agustus 2025	Dokumen	
		Reviu Rancangan Renstra oleh Tim Inspektorat		September 2025	Lembar reviu	
		Menyempurnakan Rancangan Renstra sesuai hasil reviu Inspektorat		September 2025	Dokumen penyempurnaan Renstra	
7	Penetapan Renstra 2025-2029	Penetapan Renstra 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah		September 2025	Surat Keputusan Kepala Dinas	
		Pengesahan dokumen Renstra oleh Kepala Bapeda	Lembar pengesahan dokumen	September 2025	Dokumen Lembar Pengesahan	
		Penggandaan dan penjiilidan dokumen Renstra		Oktober 2025	Dokumen Renstra 2025-2029	

Temanggung, Februari 2025

KEPADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WUJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006



**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. TEMANGGUNG
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG	Disusun Oleh/Tanggal	NABILATUL 'ULYA F
	Direviu Oleh/Tanggal	DZANI LUTFI AFID, ST
	Direviu Oleh/Tanggal	ISMADI, SIP, M.Si
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab. Temanggung Nomor: 700/394/2025 tanggal 2 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Kab. Temanggung Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
DATA UMUM :		
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika:		
1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi		
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika:		
1. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah		
3. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029		
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 31 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.		
B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)		
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 17 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagai berikut :		

No	Indikator	Satuan	Tujuan / Sasaran Program	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Program/IKD	Selaras
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	Program/IKD	Selaras
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	Sasaran/IKU	Selaras
4	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	Sasaran/IKU	Selaras
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	Tujuan/IKD	Selaras
6	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	Sasaran/IKD	Selaras
7	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	Sasaran/IKU	Selaras
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	Sasaran/IKU	Selaras
9	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Program/IKD	Selaras
10	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Program/IKD	Selaras
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Program/IKD	Selaras
12	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Program/IKD	Selaras
13	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	Sasaran/IKD	Selaras
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Tujuan/IKU	Selaras
15	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	Sasaran/IKD	Selaras
16	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Program/IKD	Selaras
17	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	Sasaran/IKU	Selaras

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut :

No	Program Prioritas Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Selaras
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Selaras
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Selaras
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Selaras

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut :

No	Program Prioritas Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Selaras
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Selaras
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Selaras
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Selaras

D. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan selaras, sebagai berikut :

No	IKU Perangkat Daerah pada Renstra	Satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra Sebelumnya	Baseline Renstra Tahun 2025 - 2029	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	0	100	Selaras
2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	0	3,64	Selaras
3	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	0	3,10	Selaras
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	0	71,50	Selaras
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,8	3,64	Selaras
	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	97,38	95,86	Selaras

2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan selaras, sebagai berikut :

No	IKU Perangkat Daerah pada Renstra	Satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra Sebelumnya	Baseline Renstra Tahun 2025 - 2029	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	100	Selaras
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	0	90,52	Selaras
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,8	3,64	Selaras
4	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	0	3,10	Selaras
5	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	100	Selaras
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0	100	Selaras
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	70,60	Selaras

No	IKU Perangkat Daerah pada Renstra	Satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra Sebelumnya	Baseline Renstra Tahun 2025 - 2029	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0	80	Selaras
9	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	97,38	95,86	Selaras
10	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	0	3,64	Selaras
11	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	41	Selaras

E. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Seluruh target subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 belum dapat diuji keselarasannya karena DSSD Tahun 2024 belum tersaji dalam aplikasi e-Reviu Renstra SIPD.

Rekomendasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar melakukan pengecekan kembali atas perumusan target seluruh subkegiatan dengan berpedoman pada DSSD.

Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Temanggung



GOTRI WJHANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si.

NIP 197712121997031006

Tanggal 15 September 2025

Tim Reviu :

1. I.G.A GANGGA SARI., S.T, M.M.
2. ISMADI, SIP, M.Si
3. DZANI LUTFI AFID., S.T.
4. WIWIK WIDYAWATI., S.E., M.S.A.
5. ANIK KRISTİYANI., S.A.P.
6. SRI BENY INDARWATI., M.A.P
7. MEIGA MUHAMMAD YUSUF., S.M.
8. NABILATUL 'ULYA F., S.M.
9. YUNIA SARLITAWATI., A.Md.Ak.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 050/27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinkominfo merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Tahun 2025 sampai dengan 2029.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinkominfo, Sumber Daya Dinkominfo, Kinerja

Pelayanan Dinkominfo, Permasalahan dan Isu Strategis Dinkominfo.

c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran, dan Target Kinerja Kunci.

e. BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 4. Arsip.
-